KEBEBASAN BERAGAMA ATAU DIALOG ANTARAGAMA 50 Tahun Hak Asasi Manusia

M. Amin Abdullah, Ph.D.

Lima puluh tahun yang lalu, setelah berakhirnya perang dunia kedua, umat manusia bersukaria dan berbangga ketika mereka berhasil mendeklarasikan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satunya adalah Hak Kebebasan Beragama, yaitu hak asasi manusia untuk memilih, menganut, memeluk, dan berpindah agama. Mereka berbangga karena hak-hak demikian tidak pernah mereka peroleh, paling tidak dalam bentuk dokumen tertulis yang disepakati oleh sebahagian besar bangsa-bangsa di dunia. Tetapi, dengan telah dideklarasikannya Hak Kebebasan Beragama, kehidupan antarumat beragama di berbagai negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bukannya berjalan tanpa masalah. Dalam kenyataan praktek di lapangan, dengan dalih HAM, institusi keagamaan yang mana pun dapat saja bertindak melampui batas-batas kewajaran dalam merealisasikan hak-hak keagamaannya. Mereka dapat menarik, membujuk, merebut penganut agama tertentu untuk pindah ke agama lain baik secara terselubung maupun terang-terangan. Lebih-lebih karena salah satu dari sekian banyak *fundamental character* yang secara intrinsik melekat dalam bangunan keyakinan penganut agama-agama adalah kewajiban para pemeluknya untuk menawarkan "keselamatan" lewat versinya masing-masing kepada orang atau kelompok lain di luar kelompoknya. Umumnya, para pegiat dakwah, misi, atau zending, memahami adanya hak kebebasan agama, tetapi adanya hak tersebut mereka pahami secara *sepihak*, sesuai dengan ajaran dan tugas mulia dari agama yang dipeluknya. Mereka tetap saja merasa lebih terpanggil, setia dan *committed* terhadap tugas dan misi yang dianggap mulia dan terhormat oleh masing-masing pemeluk agama, yakni untuk "menyelamatkan" orang yang berada di luar sistem doktrin "keselamatan" keagamaan yang biasa atau secara turun-temurun dianutnya.

Dengan begitu, Hak Kebebasan Beragama memang bersifat ambigu, bahkan *polyinterpretable* (banyak tafsir). Ia dapat dipahami dan dimanfaatkan "kedalam" dan sekaligus "keluar". Pengguna jasa Hak Kebebasan Beragama pun beragam corak pengelompokannya: individu, kelompok, keluarga, suku, adat, institusi, negara, dan begitu seterusnya yang masing-masing memiliki tafsir sendiri-sendiri. Secara normatif, Hak Kebebasan Beragama memang patut dihargai, tetapi pada tataran historis-praksis belum tentu. Pada suatu saat ia dapat dijadikan dasar tindakan untuk "meredam" kegiatan ekspansif penganut agama-agama secara berlebihan, tetapi pada saat yang lain juga dapat dijadikan sebagai senjata untuk "merebut" hati konsumen dan pasar komoditas penyelamatan rohani. Untuk yang terakhir ini sangat tergantung pada kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia dan daya dukung dana dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing institusi keagamaan. Tak kalah pentingnya, adalah juga tingkat agresivitas para pelaku dakwah, zending, dan misi. Pendek kata, dalam praktek di lapangan, Hak Kebebasan Beragama banyak menimbulkan masalah.

Agak aneh kedengarannya, bahwa dengan dideklarasikannya Hak Kebebasan Beragama, kecurigaan antarpemeluk agama bukannya berkurang, tetapi justru semakin bertambah, karena masing-masing penganut agama merasa berhak baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi untuk menyebarkan, menyiarkan, merebut, maupun mempertahankan diri secara berlebih-lebihan. Dengan begitu, Hak Kebebasan Beragama dalam praktek ternyata banyak yang melanggar batas-batas "etika" pergaulan hidup sosial-kemasyarakatan dan sosial-keagamaan serta melampui batas-batas kepatutan. Lantaran masing-masing penganut agama merasa terancam, baik secara *agamis, psikologis, ekonomis, politis,* maka Hak Kebebasan Beragama, pada ujung-ujungnya, justru lebih menggelisahkan dan menjadi beban tambahan masyarakat daripada menenangkan. Oleh karena itu, setelah 50 tahun berlalu, masyarakat beragama mulai bertanya ulang: cukup menguntungkankah atau merugikankah Hak Kebebasan Beragama setelah dideklarasikan dan diakui oleh semua pihak lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa? Bukankah Hak Kebebasan Beragama telah kehilangan relevansinya untuk terus digunakan dan dipertahankan pada era millenium ketiga, jika tanpa dibarengi catatan-catatan kritis tertentu?

Efek negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama yang diinterpretasikan oleh masing-masing penganut agama sesuai dengan kepentingan (*vested interest)* mereka sendiri-sendiri ternyata lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Oleh karena

lebih banyak menggelisahkan daripada menenangkan, maka muncullah ide-ide dari para pemerhati, peneliti, dan pangamat sosial-keagamaan untuk mempertanyakan kembali pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama di lapangan dan menghimbau untuk tidak terlalu menekankan pada aspek Kebebasan Beragama. Lama sudah orang memikirkan dan berusaha keras untuk merumuskan konsep, mencari pola atau bentuk baru hubungan antarumat beragama dalam wilayah praksis sosial. Akhirnya, ditemukan konsep yang barangkali lebih kondusif untuk masyarakat yang majemuk dalam keberagamaannya. Konsep *Dialog Antar-Agama* atau Dialog Antar-Umat Beragama muncul ke permukaan sebagai pengganti konsep Hak Kebebasan Beragama. Tidak semua Teolog, Kiai, Pastor, Pendeta, Pedande, Bhikhu, cerdik cendekiawan di perguruan tinggi maupun orang awam setuju akan konsep baru ini. Sama seperti ketika mereka merespon Hak Kebebasan Beragama terdahulu. Lebih-lebih karena *cara berpikir, sikap mental,* dan *agenda* yang muncul dari kedua konsep tersebut memang sangatlah berbeda. Jika konsep *Kebebasan Beragama,* dalam praktek di lapangan, sedikit banyak lebih mencerminkan sikap kecemburuan dan agresivitas dalam memandang dan berhubungan dengan penganut agama lain, maka dalam konsep *Dialog Antar-Agama* lebih mencerminkan sosok sikap, cara berpikir, dan bertindak yang lebih santun, menahan diri, dan arif terhadap realitas kemajemukan umat beragama. Kebebasan Beragama lebih mencerminkan *world view* atau pandangan hidup, perilaku, dan mentalitas "having a religion", sedangkan Dialog Antar-Agama lebih mencerminkan sikap, perilaku, dan mentalitas "being religious".

Dialog Antar-Agama beranggapan dan bahkan berkeyakinan bahwa "keselamatan" – apa pun bentuk, model, dan coraknya – sudah ada dalam setiap agama. Kita atau orang luar yang tidak seagama cuma ingin *memahami* bagaimana sesungguhnya model keselamatan yang dipahami, ditawarkan, diyakini, dan dilakukan oleh pengikut agama-agama lain. Tidak ada sedikit pun keinginan atau niat untuk secara agresif menyerang, memperolok-olok, mencemoohkan, apalagi sampai merebut atau memindah pemeluk agama yang satu ke yang lain. Kalaupun toh ada apa yang disebut-sebut sebagai conversi (pindah agama), itu semata-mata karena didorong oleh kesadaran paling dalam dari seseorang dan bukan karena tekanan, ajakan, atau bujukan dari pihak luar. *Religious Truth Claim* (monopoli kebenaran agama) tidak terlalu diperlukan di sini. Yang lebih diperlukan adalah proses redukasi yang diselenggarakan oleh masing-masing kelompok agama untuk para pengikutnya dalam meningkatkan kualitas kemanusiaan seseorang.

Dialog Antar-Agama lebih menitikberatkan pada keinginan dan kebutuhan untuk *saling memahami* dan *saling menukar pengalaman keagamaan yang telah dimiliki oleh masing-masing tradisi pengikut agama-agama*. Tak terbesit sedikit pun usaha-usaha untuk secara sepihak "menyalahkan," "mengkafirkan," "memperolok-olok", "menganggap tidak selamat" sistem kepercayaan yang dimiliki oleh orang lain. Jika di atas diuraikan bahwa dalam konsep "Kebebasan Beragama" masih dimungkinkan munculnya keinginan untuk "menyalahkan", "tidak menyukai", dan "menganggap tidak selamat" penganut agama lain sehingga harus diselamatkan ulang atau diagamakan kembali, maka dalam konsep Dialog Antar-Agama justru sebaliknya. Keselamatan sudah dianggap ada dalam masing-masing agama, hanya saja cara, model, sistem ajaran, dan konsepsinya berbeda dari yang *biasa* kita miliki. Maka hujat-menghujat, salah-menyalahkan, kafir-mengkafirkan tidak diperlukan lagi dalam era Dialog Antar-Agama. Kita menerima keberadaan orang lain seperti apa adanya, tanpa keinginan untuk mengubah keyakinan agamanya. Yang terjadi hanyalah proses *saling mengenal* dan *saling memahami* eksistensi dan hak masing-masing penganut agama.

Jika memang begitu *fundamental structure* serta implikasi yang ditimbulkan dari masing-masing konsep, maka konsep Kebebasan Beragama yang mengandaikan perlunya dikembangkan teologi "kerukunan" antarumat beragama, harus dikembangkan selangkah lebih lanjut menjadi Dialog Antar-Agama yang mempersyaratkan perlunya "**kerja sama**" antarumat beragama. Dengan lain ungkapan bahwa dalam kandungan konsep "kerja sama", kerukunan antarumat beragama sudah *built in* di dalamnya, sedangkan dalam kandungan konsep "kerukunan" belum tentu kerja sama antarpemeluk agama-agama *built in* di dalamnya.

Dalam menghadapi nestapa manusia era modern tingkat lanjut seperti saat sekarang ini, agama diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang menyejukkan, menenteramkan, bukan malah menjadi sumber keruwetan dan menambah beban ekstra berat yang perlu dipecahkan oleh umat manusia. Tampaknya, harapan demikian akan tinggal menjadi harapan, jika umat manusia dan umat beragama tidak bersedia memahami ulang secara lebih substansial dan berani mengubah konsepsi mereka tentang "apakah hakikat atau esensi agama tersebut"? Menurut hemat penulis, yang menjadi akar persoalan bukanlah "agama", "dien" atau "religion" itu sendiri, – yang *notabene* sering kali dianggap absolut atau mutlak oleh para pengikutnya – tetapi lebih pada *cara berpikir, mentalitas,* dan *perilaku budaya* masing-masing pengikut agama-agama.

Pola pemikiran keagamaan, mentalitas, dan perilaku budaya yang bersifat "absolut", "tertutup", "eksklusif" dan "rigid" perlu digeser ke arah corak pemikiran keagamaan yang lebih bersifat "terbuka", "luwes", "inklusif" dan "arif". Tetapi, dalam kenyataan historis, justru bentuk pemisahan yang bersifat diametral antara kedua jenis pola sikap dan cara berpikir keagamaan tersebut yang ingin secara terus-menerus dipelihara dan dilestarikan oleh para penganut agama-agama era sekarang, mewarisi pola pikir dan mentalitas keagamaan era skolastik.

Sekali waktu, umat beragama perlu juga memahami bahwa fenomena agama – selain melibatkan "wahyu" – juga lengket dengan fenomena kultural, tradisi, bahasa, adat-istiadat, *habit of mind,* dan begitu seterusnya. Untuk itu, pada level historis-empiris, adalah realistik dan bertanggung jawab rasanya untuk lebih memperbincangkan, memahami dan menyadari adanya warna-warna keagamaan yang hitam, putih, kuning, biru, hijau, merah, dan begitu seterusnya daripada terjebak pada *logical fallacy* yang "buta warna" keagamaan. Kebebasan Beragama yang dibarengi cara berpikir yang absolut, rigid, dan tertutup, lebih mengutamakan agenda yang berusaha agar seluruh warna-warna keagamaan tersebut di atas dihapus dan diganti oleh satu warna saja yang paling unggul (superioritas keagamaan atau *religious truth claim*), sedangkan Dialog Antar-Agama mencerminkan mentalitas, cara berpikir, bertindak, dan perilaku keagamaan yang lebih rendah hati. Ia dengan tulus, sepenuh hati, dan rendah hati mengakui eksistensi warna-warna keagamaan tersebut, tetapi sekaligus memustahilkan keberhasilan usaha yang dilakukan oleh siapa pun untuk menyatuwarnakan seluruh warna-warna keagamaan yang ada. Untuk itu, dihadapkan pada pilihan sulit tersebut, "kerja sama" antara berbagai umat beragama dalam praksis kehidupan dengan tetap mengakui otonomi dan eksistensi metafisis warna keagamaan masing-masing tersebut lebih menjanjikan dan memberi harapan baru. Dari situ, konsep Kebebasan Beragama yang dideklarasikan 50 tahun yang lalu oleh anggota PBB terasa kehilangan relevansinya dan dipertanyakan ulang nilai manfaatnya oleh banyak kalangan. Setelah mencermati watak dasar dan implikasi dari kedua konsep tersebut, maka upaya untuk menggantikannya dengan konsep Dialog Antar-Agama rasanya memang lebih *plausible* dan *viable* untuk masa-masa yang akan datang.